

## Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Asimetri Informasi terhadap Pencegahan Fraud

Nur Azizah<sup>1\*</sup>, Erinos<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: [nurazizah110698@gmail.com](mailto:nurazizah110698@gmail.com)

---

### Abstract

*This study aims to examine the effect of implementing the government's internal control system (SPIP) and information asymmetry on fraud prevention. This type of research is classified as quantitative research. The data in this study were collected by distributing questionnaires directly to 26 OPDs in South Solok Regency. The data used in this study is primary data. The data collection technique used a questionnaire consisting of 3 respondents in each OPD so that the questionnaires distributed were 78 questionnaires. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis using SPSS version 24.00. The results showed: The Government Internal Control System (SPIP) had a significant positive effect on fraud prevention, but information asymmetry had an effect on fraud prevention.*

**Keywords:** *Government Internal Control System; Information Asymmetry; Fraud Prevention.*

### How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)

Azizah, N & Erinos (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Asimetri Informasi terhadap Pencegahan Fraud.. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (4), 674-685.

---

## PENDAHULUAN

Dunia akuntansi yang kian berkembang tidak hanya membawa pengaruh baik untuk masyarakat, namun juga membawa pengaruh buruk seperti masalah kecurangan (*fraud*) yang semakin merajalela diberbagai sendi kehidupan, baik dalam skala kecil maupun besar. *Fraud* didefinisikan sebagai rancangan semua cara yang beranekaragam digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara memalsukan informasi atau suatu kebenaran (Black's Law Dictionary dalam Ghazali,2014). Tindakan penipuan yang dilakukan disengaja bertujuan untuk mengamankan keuntungan pribadi (Alzoubi, 2021). *Fraud* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggelapan, insidertrading, self-dealing, berbohong, kegagalan untuk mengungkapkan fakta, korupsi, manipulasi rekening, suap, phantom vendor, dan banyak lagi (Ziegenfuss, 1996) dalam Ghazali (2014). *The Assosiation of certified fraud examiners* (ACFE) pada tahun 2019 menemukan kerugian akibat dari kasus kecurangan di indonesia Rp 873,43 miliar dimana jumlah rata-rata kerugian perkasus lebih dari Rp. 7 miliar dan sebanyak 38,5% diantaranya adalah kasus kecurangan dengan jumlah kerugian lebih dari 1 miliar (ACFE,2020).

Salah satu kasus kecurangan yang sering terjadi di indonesia yaitu korupsi. Berdasarkan *indonesia corruption watch* (ICW) negara mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp. 56,7 triliun (Guritno,2021). Hasil pengukuran dalam *corruption perception index* untuk tahun 2021, indonesia berada pada skor

38 dan berada di urutan ke-96 dari 180 negara yang disurvei *Transparency International* tahun 2021. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara terkorup sehingga upaya pencegahan *fraud* di Indonesia masih belum signifikan karena masih belum bisa menurunkan peringkat Indonesia dalam urutan negara terkorup di dunia. Tingginya resiko kecurangan menuntut organisasi lebih memiliki cara yang tepat untuk mencegah terjadinya *fraud*. Pencegahan *fraud* adalah serangkaian program yang dirancang untuk mencegah atau setidaknya mengendalikan penipuan (*fraud*), cara ini terkait bagaimana mengendalikan faktor pendorong munculnya *fraud* (Yuniarti, 2017). Teori *fraud diamond* mengungkapkan bahwa adanya *opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), *rationalization* (rasionalisasi), *Capability/Capacity* (kemampuan) merupakan faktor pendorong terjadinya *fraud* (Cressey dalam tuannakota,2013).

Ghazali (2014) mengatakan jika *fraud* tidak dicegah dan dideteksi secara efektif akan menimbulkan kerusakan pada organisasi. Pencegahan *fraud*, deteksi penggelapan, dan keuangan yang akurat adalah alasan untuk membenarkan praktik pengendalian internal yang baik (Shanmugam et al,2012). *Fraud* dapat terjadi di sektor swasta maupun di sektor pemerintah (Pristyanti 2012), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan trik setiap pemerintahan agar bisa memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Mewujudkan tujuan tersebut diperlukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkualitas dan berkompeten. OPD adalah instansi di pemerintahan daerah yang bertugas menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok serta fungsinya. Memiliki pengendalian internal merupakan metode yang digunakan oleh banyak pihak untuk mencegah terjadinya kesalahan (Albrecht et.al, 2012).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pemerintah telah kembali mencoba memperkuat lini pengawasan dengan menerapkan sebuah sistem yang dikenal dengan SPIP. SPIP dilindungi instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah dapat tercapai secara efisien dan efektif, dimana laporan keuangan negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal yang telah dirancang dengan baik guna untuk mengurangi resiko kecurangan yang ada.

Kabupaten Solok Selatan merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang sampai saat ini masih dalam tahap peningkatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. Sesuai dengan tujuan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2018 mensosialisasikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk mewujudkan *good government* dalam upaya membenahi kinerja dan pengelolaan daerah. Wakil bupati Solok Selatan, Abdul Rahman mengatakan ASN harus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, salah satu cara dengan mempedomani dan ketentuan dalam SPIP. Asisten III Setdakab Solok Selatan Amdani menambahkan target level yang saat ini baru di level 2,5 bisa meningkatkan ke level tiga. Perbaikan menuju level tiga di akui masih sangat berat dan perlu komitmen semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dilindungi pemerintahan daerah. Sosialisasi SPIP ini juga menghadirkan nara sumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku perwakilan Sumatera Barat Canggih budianto, beliau menegaskan penerapan SPIP bukan sekedar formalitas, namun harus diterapkan sebagai suatu budaya atau kultur pengendalian yang menjadi bagian dari budaya kerja Pemerintah Daerah melalui kegiatan di masing-masing OPD. Maka dari itu sangat diharapkan pada setiap unit kerja untuk menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai tujuan serta bertanggung jawab keuangan dan kinerja menjadi akuntabel dan transparan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008,

(Sumbar.antaranews.com). Hal ini membuktikan bahwa SPIP di Kabupaten Solok Selatan masih dalam tahap rencana perbaikan pengembangan menjadi lebih baik.

Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati / walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam penelitian pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan moralitas pegawai dalam pencegahan *fraud* (wahyuni, 2017). Orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi dan religius tinggi dipilih sebagai pemimpin seperti para pejabat karena dianggap telah mempunyai kecerdasan dan keimanan tinggi. Presepsi akan hal tersebut salah karena banyak kasus kecurangan di Indonesia menyeret para pejabat sebagai tersangka dari kasus korupsi (Urumsah et.al,2016). Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Solok Selatan.

*Fraud* dilakukan oleh Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria sebagai penerima suap Rp. 460.000.000 dari seorang kontraktor M. Yamin kahar terkait proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan pekerjaan pembangunan jembatan Ambayan Tahun Anggaran 2018. Anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan mesjid agung sebesar Rp. 55.000.000.000 dan jembatan Ambayan sebesar Rp. 14.800.000.000 hingga anggaran tersebut tidak terealisasi bagaimana seharusnya. Untuk pengerjaan proyek ini Muzni meminta bawahannya agar pengerjaan proyek tersebut dilakukan oleh M .yamin. Muzni Zakaria dinilai terbukti melanggar pasal 12 huruf b Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto (Jo) pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan keputusan Jaksa KPK Muzni dikenakan hukuman 6 tahun penjara (kompas.com). Dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran akan pentingnya penerapan SPIP masih kurang di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, sehingga dapat dikatakan pencegahan *fraud* masih kurang dalam kinerja pemerintahan karena masih memiliki asumsi kecurangan yang cukup tinggi.

Tingginya kecurangan dalam pemerintah daerah merupakan efek dari adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh seseorang dengan seseorang lainnya. Sesuai pandangan Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan menyatakan adanya hubungan antara *agent* dan *principal*. Keadaan dimana *agent* lebih banyak memiliki informasi di bandingkan *principal* yang di sebut dengan asimetri informasi. Apabila di dalam organisasi terjadi asimetri informasi maka manajemen akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi karyawan organisasi tersebut, agar dapat memotivasi untuk memperoleh kompensasi bonus, jabatan dan lain lain. Rizky (2018) Dalam penyajian laporan keuangan tersebut manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan untuk memperbaiki rasio keuangan perusahaan serta memperbaiki reputasi perusahaan untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

Amilia (2015) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa faktor lain yang dapat mendorong terjadinya *fraud* yaitu asimetri informasi. Ketidak seimbangan informasi jika terjadi dalam pemerintah daerah yaitu antara Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dengan masyarakat, maka akan memberikan peluang bagi Kepala Daerah maupun OPD untuk melakukan tindak peyelewengan dan dan memanipulasi data (Fitri,2016). Semakin tinggi tingkat asimetri informasi maka semakin tinggi *fraud* yang terjadi (Sinarwati et.al, 2015). Apabila asimetri tinggi dalam instansi pemerintah berarti upaya pencegahan *fraud* juga harus lebih ditingkatkan untuk menelimalisir terjadinya *fraud*.

Banyaknya peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai faktor mempengaruhi *fraud* seperti penelitian (Najahningrum,2013; Suryandari,2016; Faisal,2013; Saputro& Mahmud,2015; Pristiayanti,2012; Zulkarnain,2013) menandakan bahwa kasus *fraud* tidak akan pernah habis untuk dibahas, sedangkan penelitian mengenai pencegahan *fraud* masih sedikit jumlahnya. Maka peneliti termotivasi melakukan penelitian mengenai pencegahan *fraud* di Kabupaten Solok Selatan, mengingat kasus *fraud* yang juga sering terjadi di Kabupaten Solok Selatan dan kesadaran akan pentingmencegah terjadinya *fraud* dalam pemerintahan masih kurang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Asimetri informasi

sebagai variabel mempengaruhi pencegahan *fraud*, sesuai saran penelitian sebelumnya Wahyuni (2017) menambah variabel lain dalam penelitian selanjutnya, dan juga menyarankan penelitian ke OPD kota/ daerah lainnya.

## REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak antara satu orang atau lebih (principal) melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Akibat hubungan agensi ini, maka munculnya *agency problem* yang dalam hal ini pihak agen akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sementara mengabaikan kepentingan prinsipal. Principal adalah pihak pemberi informasi sedangkan agen pihak penerima informasi. Hal tersebut akan mensyaratkan agen untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya kepada principal.

Menurut Lane (2000) dalam Purniasari, Cici (2016) mengatakan bahwa teori keagenan bisa diterapkan dalam organisasi publik. Halim dan Abdullah (2006) mengatakan bahwa dipemerintah daerah terdapat masalah dalam pelimpahan wewenang (keagenan). Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah adalah sebagai agent bagi masyarakat (principal). Pendelegasian wewenang oleh principal dan agen akan menimbulkan kemungkinan terjadinya *agency problem* yang dapat menyebabkan *agency conflict*, yaitu konflik yang timbul karena keinginan agen untuk melakukan tindakan yang sesuai kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan prinsipal (Rebecca dan Siregar 2012). Konflik ini juga terjadi karena adanya asimetri informasi dimana agen mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan principal, Aprilia (2017) mengatakan bahwa ketidak samaan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent disebut dengan asimetri informasi. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi information asymmetry (Fama dan Jensen 1983).

### Teori Fraud Diamond (*Fraud Diamond*)

*Fraud Diamond* adalah pandangan baru terhadap fenomena *fraud* yang diusulkan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori ini adalah bentuk pembaruan dari Teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1950) yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa orang melakukan fraud ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan / pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka.

Keterkaitan teori fraud diamond terhadap penelitian ini untuk menjelaskan alasan seseorang melakukan kecurangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan ilegal yaitu kecurangan. Teori ini juga mengemukakan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Dari penjelasan di atas, diungkapkan bahwa ada 4 faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud yaitu *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (peluang), dan *Rasionalization* (rasionalisasi) dan *Capability/Capacity* (kemampuan).

*Commonwealth Fraud Control* (2011) dalam Nurhayanto (2013) *fraud* secara umum diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur untuk memperoleh keuntungan,

atau mengakibatkan timbulnya kerugian yang dilakukan dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

Konsep *fraud* diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan cara yang mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi yang akan berakibat merugikan orang lain.

### **Pencegahan *Fraud***

Ibarat kata pepatah, “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Begitu pula dengan *fraud*. Pencegahan *fraud* seharusnya lebih ditekankan pada suatu organisasi, mencegah *fraud* akan memberikan penghematan yang besar karena biaya deteksi dan investigasi dapat diminimalkan. Pencegahan *fraud* akan meminimalkan kemungkinan terjadinya *fraud* dan mengoptimalkan kemungkinan *fraud* terdeteksi. Menghapuskan *fraud* merupakan tujuan dari pencegahan *fraud* ini sendiri.

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

*The Committee on Sponsoring the Treadway Committee (COSO)*, di dalam Modul 1 Gambaran Umum SPIP (2009) mendefinisikan pengendalian intern sebagai tahap yang dilakukan oleh manajemen dan personil lain dalam organisasi, yang disusun untuk mendapat keyakinan yang memadai bahwa akan terdapat perbaikan dalam pencapaian tujuan-tujuan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Definisi tersebut merupakan ciri yang paling mempengaruhi paling berpengaruh pada efektivitas pengendalian adalah proses, dan tanggung jawab dari seluruh anggota organisasi untuk membentuk pengendalian. COSO beranggapan pengendalian intern merupakan serangkaian tindakan yang mencakup seluruh kegiatan organisasi yang dilakukan orang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Tindakan ini mencakup tips dari manajemen dan anggota organisasi lain dalam menjalankan aktivitas kegiatannya serta saling berhubungan antar unit kerja.

### **Asimetri Informasi**

Situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi merupakan bentuk definisi dari Asimetri informasi (Amalia, 2015). Di sektor publik, asimetri ini terjadi pada Kepala Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dijadikan bahan pengelola dana dengan masyarakat sebagai pemilik dana. Apabila laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka akan memberikan banyak peluang bagi Kepala Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan tindakan penyelewengan dana dan manipulasi data.

Asimetri informasi akan mempegaruhi manajer dalam sebuah perusahaan untuk menyajikan informasi yang tidak akurat dan mengesampingkan keadaan aktual yang sebenarnya terutama sekali jika informasi tersebut bersangkutan serta berkaitan dengan pertimbangan atau pengukuran kinerja dimana manajer bisa secara fleksibel untuk melakukan manajemen laba.

### **Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Pencegahan *fraud***

Sebuah organisasi memerlukan suatu sistem yang bisa dijadikan pedoman bagi karyawan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* untuk mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud* (Fama

dan Jensen 1983). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dikenal suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Karena memiliki pengendalian internal yang efektif merupakan metode yang digunakan oleh banyak pihak untuk mencegah terjadinya kesalahan (Albrecht et.al, 2012). Menurut Dimitrijevic et.al, (2017) pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, dengan menciptakan 19 kondisi internal yang baik dapat mencegah timbulnya faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya *fraud*. Maka jika suatu instansi ingin berkembang dan maju terbebas dari kecurangan harus ada pengendalian internal serta perilaku yang baik didalamnya serta turut mendukung jalannya sistem pengendalian internal pada instansi tersebut. Hal ini dapat diartikan semakin baik pengendalian internal maka pencegahan *fraud* Semakin baik.

**H1:** Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

### **Hubungan Asimetri Informasi dengan Pencegahan Fraud**

Memiliki informasi lebih, banyak individu menyalah gunakan akan kesempatan, tanpa berfikir apa dampak dan resiko yang akan terjadi atas tindakan yang di salah gunakan tersebut. Pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri, serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak agent (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya asimetri informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen (Fama dan Jensen 1983).

Asimetri Informasi terjadi apabila suatu instansi memiliki ketidakselarasan informasi yang tinggi, maka kecenderungan fraud yang dilakukan juga semakin meningkat. Untuk itu pemberian informasi harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi pemanfaatan pemberian informasi secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecenderungan *fraud* dan dapat merugikan pihak lain, maka asimetri informasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* berdasarkan penelitian (Naulita,2020).

**H2:** Asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif ialah untuk mendapatkan kejelasan dari suatu teori dan hukum-hukum realitas. Penelitian Kuantitatif selalu di pakai untuk mendapatkan bukti dan menampik suatu teori, kemudian di bahas lalu diambil sebuah kesimpulan. Populasi adalah sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2013). Jadi, populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai OPD Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 26 OPD.

Data yang digunakan merupakan data primer. Data primer yaitu data yang berasal dari setiap kuesioner setiap pemegang jabatan pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 26 satuan kerja vertikal Kabupaten Solok Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner personal (*personally administrated questionnaires*). Responden diminta untuk mengisi kuesioner, lalu kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan saat itu juga. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Uji F dan koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Tabel 1 Nilai rata-rata (mean) pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen sebesar 77,85 dengan standar deviasi sebesar 12,656. Nilai maksimum dan minimum pencegahan *fraud* adalah 99 dan 53. Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah pengendalian internal pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 78,10 dengan standar deviasi 13,682. Nilai maksimum dan minimum pada ini variabel pengendalian internal pemerintah adalah 100 dan 56. Variabel independen yang kedua adalah asimetri informasi memiliki nilai rata-rata sebesar 58,83 dengan standar deviasi 10,941. Nilai maksimum dan minimum variabel asimetri informasi adalah sebesar 74 dan 40, hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini beragam dan bervariasi dikarenakan standar deviasi yang dimiliki oleh semua variabel besar dari 0.

**Tabel 1**  
**Deskriptif Statistik**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengendalian Intern	78	56	100	78.10	13.682
Asimetri Informasi	78	40	74	58.83	10.941
Pencegahan Fraud	78	53	99	77.85	12.656
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Data Primer yang diolah 2019

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai F hitung sebesar 159,401 dengan signifikan 0,000 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha$  5% (0,05), atau dilihat dari F hitung lebih besar pada F tabel 159,401 > 2,73 Artinya bahwa penerapan pengendalian internal pemerintah dan asimetri informasi bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh R sebesar 0,810 yaitu terdapat hubungan yang kuat positif antara variabel independen (pengendalian internal pemerintah dan asimetri informasi) dengan variabel dependen (pencegahan *fraud*) dan nilai koefisien determinansi atau  $R^2$  (R Square) sebesar 0,810 atau (81%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase hubungan pengaruh variabel independen seraca bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen sebesar 81%, sisanya 19% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk model penelitian ini.

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.637	3.748		3.372	.001
	Pengendalian Intern	.363	.089	.393	4.076	.000
	Asimetri Informasi	.626	.112	.541	-5.613	.000
F hitung: 159.401						
R <sup>2</sup> : 0,810						

Sumber : Data Primer yang diolah 2019

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai konstanta (a) adalah 12,637 sedangkan koefisien regresi pengendalian internal pemerintah (bX1) sebesar 0,363 dan koefisien regresi asimetri informasi (bX2) sebesar 0,626. Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dapat

dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 berarti tingkat signifikansinya dibawah 0,05 dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $4.076 > 1,994$  maka H1 diterima.

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pencegahan Fraud**

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan antara pengendalian internal dengan masalah kecurangan sangat berkaitan. Adanya pengendalian internal dalam suatu instansi pemerintah dipercaya dapat membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya *fraud*, sesuai dengan pendapat (Fama dan Jensen 1983) dalam *agency theory* yang mengatakan bahwa Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internal atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan efektivitas dan efisiensi operasi (Tunggal, 2011:3).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) yang menyatakan keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sistem pengendalian yang efektif, maka kegiatan operasional juga dapat berjalan secara efektif dan juga efisien sehingga kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses operasional instansi juga dapat diminimalisir.

### **Asimetri Informasi dan Pencegahan Fraud**

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 berarti tingkat signifikansinya dibawah 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,626 berarti mempunyai arah negatif. Nilai  $t_{hitung} -5.613 > t_{tabel} 1,994$ . Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka H2 diterima.

Berdasarkan hasil uji analisis diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan negatif asimetri informasi terhadap pencegahan *fraud* terbukti, apabila suatu instansi memiliki asimetri informasi yang tinggi, maka tingkat kecurangan akan semakin meningkat oleh sebab itu pencegahan *fraud* juga perlu ditingkatkan. Sebaliknya semakin rendah asimetri informasi maka akan menurunkan pencegahan *fraud*. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymetry* antara pihak agent (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat) yang mengakibatkan munculnya *agency problem*, dalam hal ini pihak agen akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan sendiridari banyaknya informasi yang dimiliki agendan mengabaikan kepentingan principal yang memiliki sedikit informasi dari agen. Adanya asimetri informasi inilah yang yang memungkinkan terjadinya celah penyelewengan atau korupsi oleh agen (Fama dan Jensen 1983). Untuk itu pemberian informasi harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi pemanfaatan pemberian informasi secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terjadinya *fraud*.

## **SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN**

### **Simpulan**

Melihat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan asimetri informasi terhadap pencegahan *fraud* pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan merupakan tujuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan hasil dari penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Adanya pengawasan dan evaluasi atas aktivitas-aktivitas operasional secara terus menerus dalam instansi dapat mencegah terjadinya kecurangan.
2. Terdapatnya pengaruh negatif dan signifikan antara asimetri informasi terhadap pencegahan *fraud*. Pemberian informasi harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi pemanfaatan pemberian informasi secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terjadinya *fraud*.

### **Saran**

1. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah Pengendalian Internal yang terdapat dalam instansi telah berjalan dengan baik.
2. Asimetri informasi dapat dijadikan acuan bagi organisasi dalam meminimalisir pencegahan *fraud* pada OPD
3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas cakupan pengguna informasi keuangan, tidak hanya OPD di daerah Kabupaten Solok Selatan, tetapi juga bisa meliputi daerah lain.
4. penelitian selanjutnya dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian.
5. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih banyak memaparkan pernyataan positif dari pada negatif, karena kurang pahamnya responden sehingga kemungkinan responden menjawab tidak tepat.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena ada beberapa responden yang mengisikuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Serta masih kurangnya partisipasi aktif dari target responden yang sudah direncanakan peneliti dari awal penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, R. D. (2015). *Pengaruh keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura)*. JOM FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Amrizal. 2014. "Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor". Jakarta: Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
- Aranta, Petra Zulia. 2013. *Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto)*. Skripsi Universitas Negeri Padang: Padang.
- Aren, Randal J. Elder dan Mark S.Beasley. 2013. "Auditing dan Pelayanan Verifikasi". Indeks. Jakarta.
- Ariani, et al.2014. "Analisis Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan

- Akuntansi Di PDAM Kabupaten Bangli*". Singaraja: E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2 No.1
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- BPKP. 2017. "*Fraud Auditing*". Edisi Kedelapan.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasara edisi pertama*. Jakarta: kencana prenadamedia goup.
- DianPurnamasari. (2015). *Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Triangle terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Saat Ujian dan Metode Pencegahannya*. Skripsi. Malang:Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Dunk, A. S. April 2013. *The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on The Relation Between Budgetary Participation and Slack*. *The Accounting Review*. pp. 400-410.
- Fitri, Y. (2016). *Pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, ketaatanakuntansi, asimetri informasi dan moralitasindividu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau)*. Jom Fekon.Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016.
- Fri lia, Figna. (2015). *Pengaruh Asimetri Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru)*. Jurnal Fekon, Vol. 2 No.1
- Ghozali, Imam. 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herman, lisa Amelia. 2013. *Pengaturan Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (Studi Empris Pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang*. Jurnal Akuntansi Vol 1. No 1
- Hermiyetti. 2011. *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Kurniawan, Gusnardi. 2013. *Pengaruh Moralitas, Motivasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri: Padang.
- Kurniawati, Ema. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud dalam Perspektif Fraud Triangle*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lestari, Ni Komang Linda dan Ni Luh Supadmi. 2017. *Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas dan Asimetris Informasi Terhadap Pada Kecenderungan Akuntansi Pada OPD Kabupaten Kluntung*. E-Jurnal Akuntansi. Vol.21 No. 1
- Modul 1 Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah -Gambaran Umum SPIP. 2009. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Modul 2 Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah -Lingkungan Pengendalian. 2009. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Modul Diklat Perilaku Penyimpangan (Fraud). 2017. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Modul Diklat Sertifikasi Audit Forensik –Pencegahan dan Pendeteksian Fraud. 2017. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- Novikasari, Yully. 2017. *Pengaruh moralitas individu, sistem pengendalian intern pemerintah, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi* (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Kuantan Singingi). Jurnal Fekon, Vol. 4 No.1
- Nurhayanto. 2013. “*Sistem Kendali Kecurangan (fraud) Perbankan*”. Jakarta: Tinta.
- Ompusunggu, Krisler B. dan Bawono, Icut R. 2016. “*Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) terhadap Informasi Asimetris (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri di Kota Purwokerto Jawa Tengah)*”. Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang, 23-26 Agustus 2016.
- Prawira, I Made, dkk. 2014. *Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi: Studi empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
- Putri, Ananda Aprishella. 2014. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Nominal. Vol 3. No.1
- Putri, Dhermawati Mustikasari. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. Skripsi Akuntansi*. Universitas Negeri Semarang.
- Ramadhan Arif, dkk. 2016. *Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Solok)*
- Randiza, I. (2016). *Pengaruh pengendalian internal, asimetri informasi, moralitas aparat pemerintah dan ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi* (Studi kasus pada SKPD Kab. Indragiri Hilir). Jom Fekon. Vol. 3 No.1 (Februari) 2016.
- Rasibo, Nurmalasari. 2015. *Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme dan Pengalaman terhadap Professional Judgment Auditor Dalam Pengevaluasian Bukti Audit*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rr Rani M Triasmara dan Yane Devi Anna. 2014. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi, dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. e-Proceeding of management*. Vol 1 No 3
- Sekaran, Uma. 2016. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Setiawan, Wawan. 2015. *Fraud: Suatu Tinjauan Teoritis*. Kompak.No.7
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Suhardi, 2006. *Pemasaran Jasa Konsep dan Implementasi*. Ekonisia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta
- Tjahjono, Subagio., Josua Tarigan., Budi Untung., Jap Effendi., dan Yohana Hardjanti. 2013. *Business Crimes and Ethics: Konsep Dan Studi Kasus Fraud Di Indonesia Dan Global*. Yogyakarta: Andi.
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI). Edisi ke 2: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wilopo. (2016). *“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia”*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.9.